



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN DALAM OTONOMI DAERAH**

Oleh :

ARIMBI RIAU PUTERI

05 951 052

Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Ilmu Ekonomi

**Diajukan Sebagian Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PADANG
2009**



No.Alumni Universitas	ARIMBI RIAU PUTERI	No.Alumni Fakultas
-----------------------	--------------------	--------------------

a). Tempat/Tgl lahir: Pekanbaru, 28 Juni 1987 b). Nama Orang Tua: Sulistiono dan Nurmiati c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 05 951 052 f). Tgl Lulus: 5 November 2009 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,14 i). Lama Studi: 4 tahun 2 bulan j). Alamat Orang Tua: Jln Karya Blok B No.4 Paus Ujung, Pekanbaru-Riau

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DALAM OTONOMI DAERAH**

*Skripsi SI Oleh: Arimbi Riau Puteri
Pembimbing Drs. H. Masrizal, M. Soc. Sc*

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk membiayai keperluan rumah tangganya sendiri dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Perkapita Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu 3.082.919,44 Milyar Rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2004 yang hanya sebesar 1.945.314,39 Milyar Rupiah. Namun, penerimaan pajak daerah kabupaten Pesisir Selatan sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah, persentasenya relatif kecil, yaitu rata-rata hanya 14% pada tahun 2005/2006 dan menurun menjadi 11% pada tahun 2006/2007. Skripsi ini akan menganalisis bagaimana kemampuan keuangan daerah kabupaten pesisir selatan dalam menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan temuan empiris dengan analisis regresi PDRB/Kapita dan struktur perekonomian daerah secara statistik koefisien regresinya bersifat tidak signifikan dan sama dengan nol. Namun, secara simultan, kedua variabel ini memiliki koefisien determinasi (R^2) yang cukup baik. Oleh karena itu, struktur perekonomian daerah dan perubahan pendapatan perkapita, berpengaruh terhadap rasio PAD/Total Penerimaan Daerah.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 5 November 2009. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Drs. H. Masrizal, M.Sos.Sc (Pembimbing)	Dr.H.Hefrizal Handra (Pembahas I)	Drs. H.Zulkarnaini Rus (Pembahas II)

Mengetahui :
Ketua Jurusan : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec,DEA,Ing
NIP. 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No. Alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia, sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antardaerah dan wilayah (Sjahfrizal, dalam Waluyo, 2007). Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*Money Follows Functions*", yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Waluyo, 2007).

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004) menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah (kabupaten dan kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki (Adi, 2008). Menurut Mardiasmo sebagaimana yang dikutip oleh Adi (2008) menyatakan, bahwa daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, tetapi dituntut untuk mengembangkan kreatifitas

dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan terpasung.

Menurut Lin dan Liu; Mardiasmo, dan Wong, yang dikutip dalam Adi, (2008) juga menyebutkan, adanya kewenangan yang dimiliki ini, memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, dalam Adi, 2008). Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Untuk itu, pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah (Adi, 2007).

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Menurut Bastian (dalam Adi, 2008) tema sentral dari reformasi tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance* dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada Bab I sampai dengan Bab IV, terutama Bab V yang berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Selanjutnya, diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam rangka memperkuat kemampuan keuangan daerah kabupaten Pesisir Selatan.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat Otonomi Fiskal Daerah (OFD) kabupaten Pesisir Selatan selama periode penelitian masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kecilnya angka penerimaan PAD dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang jauh lebih besar. Besarnya total penerimaan daerah ini akibat dari besarnya kontribusi dana perimbangan (DAU)
- b. Pengujian model Otonomi Fiskal Daerah dengan data 12 tahun pengamatan menunjukkan, bahwa variabel eksplanatori PDRB/Kapita dan struktur perekonomian daerah, secara statistik koefisien regresinya signifikan dan menolak hipotesis nol (tolak H_0). Secara simultan, kedua variabel ini memiliki koefisien determinasi yang cukup baik, karena variabel independen mampu menjelaskan sebanyak 58,0% tingkat keragaman otonomi fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana. Akses Download: 16 November 2008. 14:20 WIB.
- Adi, Priyo Hari. 2008. "Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah (Studi PADA Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa)". Akses Download: 17 November 2008. 14:20 WIB.
- Algifari. 2000. *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Devas, Dick, et.al. 1989. *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajat. 1995. "Desentralisasi Fiskal Sebagai Alternatif Sumber Daya Pembangunan dan Mewujudkan Otonomi Daerah". Yogyakarta: FE-UII.
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. 1989. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (edisi kelima) (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Mediakom.
- Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah". Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002. Akses Download: 20 November 2008. 16:00 WIB.
- Supranto, J. 1983. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Susanti, Hera. 1995. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*. LPEM-FEUI. Lembaga Penerbit FEUI.